



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2020**

**Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan  
Provinsi Sumatera Utara**



**LPMP PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

**SIAP BERSIH MELAYANI MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI**

## KATA PENGANTAR

# KEPALA LPMP PROVINSI SUMATERA UTARA

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua*



**P**uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya LPMP Provinsi Sumatera Utara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2020.

LPMP Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 menetapkan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya penjaminan mutu pendidikan diseluruh jenjang pendidikan dengan 3 indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan melalui program pendidikan dasar dan menengah. Secara umum LPMP Provinsi Sumatera Utara telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya belum terbangunnya budaya mutu pada satuan pendidikan, rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, dan terbatasnya kewenangan LPMP Provinsi Sumatera Utara melakukan intervensi langsung pada satuan pendidikan sebagai upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan peningkatan kualitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan LPMP Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 dan bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan, anggaran, perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja bagi terwujudnya *Good Governance*.

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

Medan, 28 Januari 2021

Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara

Afrizal Sihotang, S.T, M.Si

NIP 197412112002121001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR GRAFIK .....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum .....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi .....	4
D. Isu-isu Strategis .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara .....	18
B. Realisasi Anggaran .....	37
BAB VI PENUTUP .....	40
Lampiran	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Keunggulan laman baru LPMP Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Aspek Tampilan, Keamanan dan Penggunaan .....	12
Tabel 2.1.	Tahapan Renstra LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 ...	14
Tabel 2.2.	Target Kinerja Yang Terdapat Pada Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara .....	16
Tabel 2.3.	Peta Keterkaitan IKK Dengan <i>Output</i> Kegiatan LPMP Provinsi Sumatera Utara .....	16
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 1.1 .....	19
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 1.2 .....	20
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 1.3 .....	21
Tabel 3.4.	Jumlah Sekolah Berdasarkan Nilai Rapor Mutu .....	22
Tabel 3.5.	Hambatan Dan Solusi Dalam Merealisasikan Target Pada IKK 1.1 .....	24
Tabel 3.6.	Rekapitulasi Jumlah Sekolah Berdasarkan Nilai Rapor Mutu Kabupaten/Kota .....	24
Tabel 3.7.	Rekapitulasi Jumlah Sekolah dengan Nilai Rapor Mutu Diatas 6,59 Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten/Kota .....	25
Tabel 3.8.	Jumlah Sekolah Berdasarkan Interval Nilai Rapor Mutu .....	26
Tabel 3.9.	Hambatan Dan Solusi Dalam Merealisasikan Target pada IKK 1.2 ...	27
Tabel 3.10.	Rekapitulasi Jumlah Sekolah Berdasarkan Interval Rapor Mutu Kabupaten/Kota .....	27
Tabel 3.11.	Rekapitulasi Sekolah Interval Dalam Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten/Kota .....	28
Tabel 3.12.	Sebaran Rapor Data Pokok Pendidikan .....	29
Tabel 3.13.	Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 2.1 .....	34
Tabel 3.14.	Capaian Kinerja Anggaran .....	36
Tabel 3.15.	Alokasi, Realisasi dan Persentase Daya Serap Anggaran .....	37
Tabel 3.16.	Realisasi Anggaran Perjenis Belanja .....	37
Tabel 3.17.	Realisasi Anggaran Berdasarkan <i>Output</i> .....	38



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi LPMP Provinsi Sumatera Utara .....	5
Gambar 1.2.	Pelaksanaan <i>Rapid Test</i> di LPMP Provinsi Sumatera Utara .....	7
Gambar 1.3.	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Daring .....	8
Gambar 1.4.	Penandatanganan Komitmen Bersama Mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP Provinsi Sumatera Utara	9
Gambar 1.5.	Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara Bersama Agen Perubahan .....	9
Gambar 1.6.	Pembacaan Ikrar Agen Perubahan LPMP Provinsi Sumatera Utara .....	9
Gambar 1.7.	Tampilan Laman LPMP Provinsi Sumatera Utara Lama .....	11
Gambar 1.8.	Tampilan Laman LPMP Provinsi Sumatera Utara Baru .....	11
Gambar 3.1.	LPMP Provinsi Sumatera Utara Menerima Piagam Penghargaan BMN Untuk Wilayah Kerja KPKNL Medan .....	35
Gambar 3.2.	Aplikasi SIMPROKA LPMP Provinsi Sumatera Utara .....	36

## DAFTAR GRAFIK

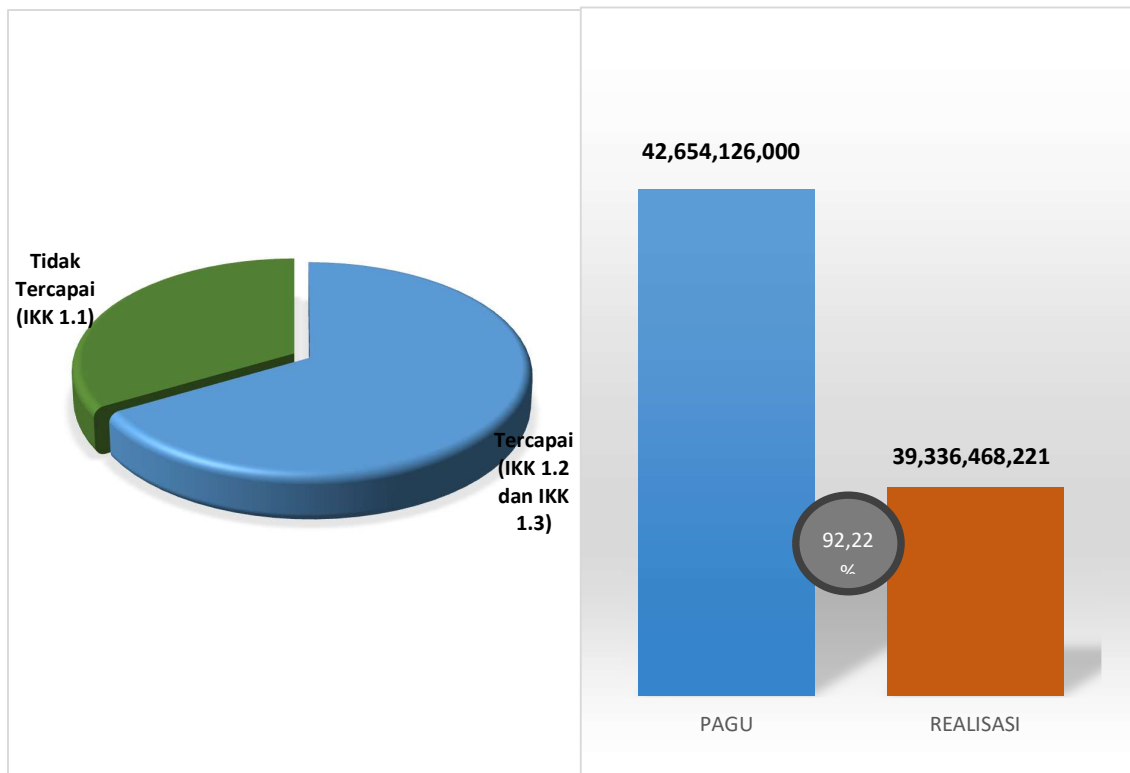
Grafik 1.1.	ASN LPMP Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Kelamin .....	2
Grafik 1.2.	ASN LPMP Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....	2
Grafik 1.3.	ASN LPMP Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Golongan .....	3
Grafik 3.1.	Persentase Satuan Pendidikan dengan Nilai Rapor Mutu Diatas 6,59 ..	22
Grafik 3.2.	Persentase Satuan Pendidikan Dengan Nilai Rapor Mutu Diatas 6,59 .	22
Grafik 3.3.	Persentase Capaian IKK 1.2 .....	26
Grafik 3.4.	Nilai Sebaran Rapor Akurat di Provinsi Sumatera Utara .....	29
Grafik 3.5.	Nilai Sebaran Rapor Berkelanjutan Kabupaten/Kota .....	31
Grafik 3.6.	Nilai Sebaran Rapor Mutakhir Kabupaten/Kota .....	32
Grafik 3.7.	Nilai SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara .....	34
Grafik 3.8.	Capaian Peringkat SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara .....	34
Grafik 3.9.	Capaian Kinerja Anggaran LPMP Provinsi Sumatera Utara .....	36
Grafik 3.10.	Persentase Kinerja Anggaran Tahun 2020 .....	37
Grafik 3.11.	Persentase Kinerja Anggaran Berdasarkan Realisasi Belanja .....	38
Grafik 3.12.	Target dan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan .....	39
Grafik 3.13.	Persentase Daya Serap Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan .....	39
Grafik 4.1.	Persentase Daya Serap Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan .....	40
Grafik 4.2.	Realisasi Anggaran LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 .....	41

## IKHTISAR EKSEKUTIF

LPMP Provinsi Sumatera Utara merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LPMP Provinsi Sumatera Utara melakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020.

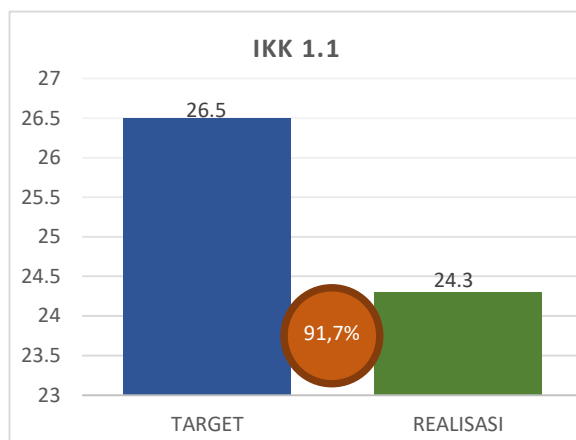
Laporan Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara ini merupakan Laporan Kinerja tahun pertama atas pelaksanaan Rencana Strategis LPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2024. Laporan ini memberikan informasi tingkat pencapaian indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja antara Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara dengan Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen.



Indikator Kinerja Kegiatan	Hambatan Dalam Merealisasikan Target	Solusi Yang Dilakukan
<b>IKK 1.1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak tercapainya nilai rapor mutu sekolah dengan nilai diatas 6,59 disebabkan rendahnya pencapaian nilai pada standar pendidik dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana.</li> <li>- Terbatasnya kewenangan LPMP terhadap satuan pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP).</li> <li>- Belum sepenuhnya terbangun budaya mutu pada satuan pendidikan.</li> <li>- Rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LPMP Provinsi Sumatera Utara menyusun profil mutu pendidikan jenjang SD, SMP dan SMA dan memberikan rekomendasi peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara serta berdasarkan indikator rapor mutu pada masing-masing Standar Nasional Pendidikan (SNP).</li> <li>- LPMP Provinsi Sumatera Utara menjalin kemitraan dengan setiap pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dalam memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan.</li> </ul>
<b>IKK 1.2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih terdapat sekolah dengan nilai rapor mutu di bawah 6,13. Hal ini disebabkan rendahnya pencapaian pada standar sarana prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan pendampingan sekolah untuk meningkatkan 8 SNP</li> <li>- Melakukan pengawasan data dapodik sekolah</li> </ul>

Capaian Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**IKK 1.1. Persentase Satuan Pendidikan (Jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75.**



Menggunakan pendekatan nilai rapor mutu sekolah dari aplikasi PMP tahun 2019.

Ditetapkan ambang batas nilai rata-rata SD, SMP, SMA dan SLB sebesar 6,59.

Realisasi IKK 1.1 adalah 24,3% dari target sebesar 26,5% sehingga capaian kinerja = 91,7%.



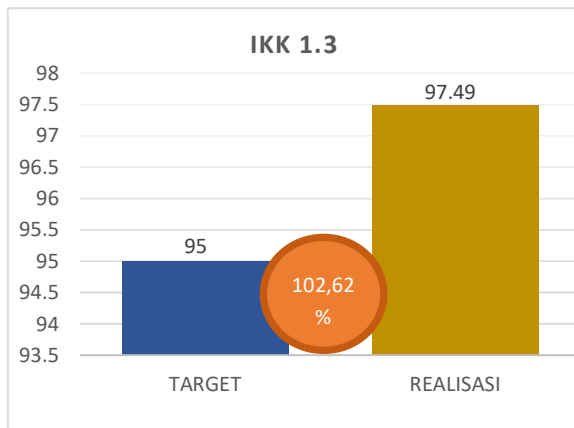
**IKK 1.2. Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk.**



Menggunakan pendekatan nilai rapor mutu sekolah dari aplikasi PMP tahun 2019. Populasi **11.492** sekolah. Dengan ambang batas kinerja terburuk 6,13 (p-0,02) dan ambang batas kinerja terbaik 6,75 (p-0,98) terdapat sekolah yang memiliki nilai <6,13 dan >6,75 sebanyak **387** sekolah. Persentase kesenjangan =  $(387/11.492)*100\% = 3,4\%$ .

Dengan demikian Capaian Kinerja IKK 1.2 adalah sebesar 147%.

**IKK 1.3. Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan**



Menggunakan data rapor dapodik *online* per 8 Januari 2021, Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai Rapor Dapodik sebesar 97,49 dari target nilai sebesar 95 pada perjanjian kinerja tahun 2020.

Dengan demikian capaian kinerja IKK 1.3 adalah sebesar 102,62%.

# **BAB - I**

# **PENDAHULUAN**

**LPMP PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

**SIAP BERSIH MELAYANI MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

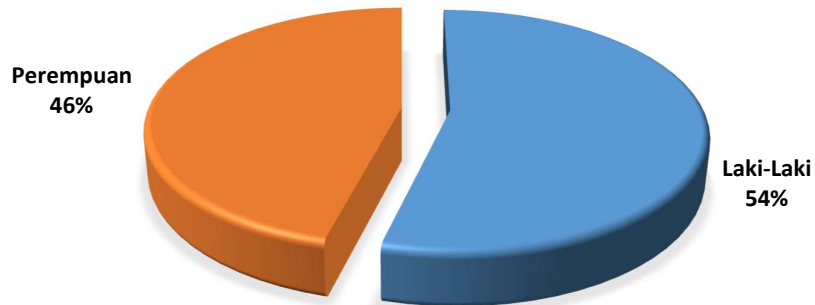
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Utara, adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Organisasi dan Tata Kerja LPMP diatur dalam Permendikbud No. 26 tahun 2020. Saat ini LPMP Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Bapak Afrizal Sihotang, S.T., M.Si yang merupakan Kepala ke-Enam sejak LPMP Provinsi Sumatera Utara berdiri pada tahun 1991.

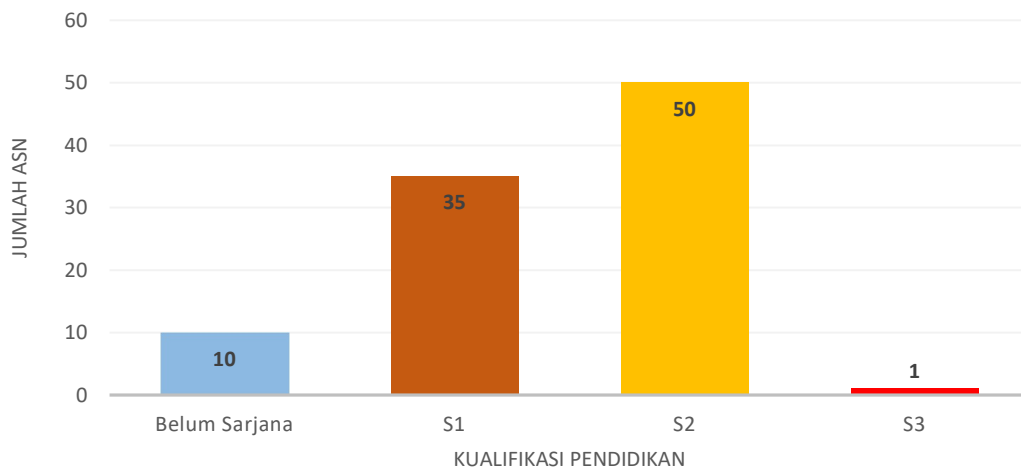


## SUMBER DAYA MANUSIA :

LPMP Provinsi Sumatera Utara memiliki ketersediaan sumber daya manusia sebanyak 96 orang ASN yang terdiri dari 52 orang laki-laki dan 44 orang perempuan. Disamping itu terdapat 75 orang PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri).

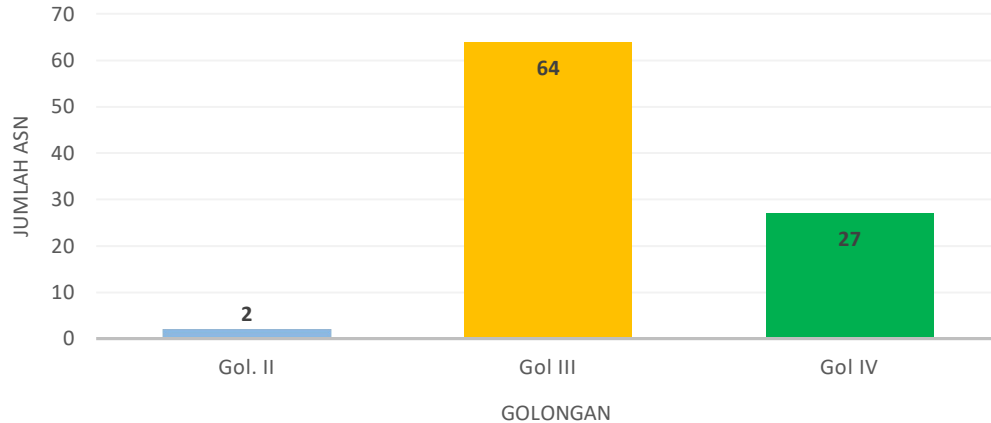


Grafik 1.1. ASN LPMP Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 1.2. ASN LPMP Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan





Grafik 1.3. ASN LPMP Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Golongan

## B. DASAR HUKUM



1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud.

## C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Permendikbud No. 26 Tahun 2020, LPMP Provinsi Sumatera Utara merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

### **TUGAS :**

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bertugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

### **FUNGSI :**

- a. pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- d. pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;
- e. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
- f. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi.

# STRUKTUR ORGANISASI

(Permendikbud No. 26 Tahun 2020)

Struktur organisasi LPMP Provinsi Sumatera Utara terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi LPMP Provinsi Sumatera Utara

## D. ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan Utama yang dihadapi LPMP Provinsi Sumatera Utara dan solusi yang telah dilakukan :

### 1) Realokasi Anggaran

- Alokasi anggaran LPMP Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020 pada awalnya adalah Rp. 76.005.343.000. Pada bulan Mei tahun 2020 dilakukan revisi anggaran terkait adanya pandemi Covid-19 dimana kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan secara tatap muka diubah metode pelaksanaannya menjadi kegiatan dalam jaringan (daring) dan alokasi anggaran turun menjadi Rp. 45.797.374.000,-.
- Pada bulan November 2020 dilakukan lagi revisi anggaran menjadi Rp. 42.654.126.000,-

### 2) Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah merubah banyak aspek kehidupan termasuk juga dunia pendidikan. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa pandemi Covid-19 LPMP Provinsi Sumatera Utara telah melakukan langkah-langkah antara lain :

- Penerapan program bekerja dari rumah (BDR) dengan menggunakan sistem presensi dalam jaringan (daring) (<http://bit.ly/wfhlpmppagi> dan <http://bit.ly/wfhlmpmsore>), sehingga hasil kerja ASN LPMP Provinsi Sumatera Utara dapat dipantau.
- Pelaksanaan *rapid test* bagi seluruh ASN LPMP Provinsi Sumatera Utara.
- Penerapan lingkungan LPMP Provinsi Sumatera Utara sebagai kawasan wajib bermasker.
- Penyediaan sarana dan prasarana untuk penerapan protokol kesehatan antara lain penyediaan wastafel pada setiap gedung, pembagian masker dan *hand sanitizer*
- Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di masa pandemi Covid-19 dengan sistem pembelajaran daring.
- Pelaksanaan kegiatan Bimtek Daring, dilakukan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan antara lain 18 ruang audio visual, dimana setiap ruang disediakan komputer dengan kapasitas penyimpanan sampai dengan 1 TB dan didukung *bandwidth internet* 200 Mbps serta aplikasi pendaftaran peserta kegiatan



melalui alamat portal <https://bimtek.lpmp-sumut.kemdikbud.go.id>. Selain itu LPMP Provinsi Sumatera Utara juga membeli 30 paket akun *zoom meeting*.

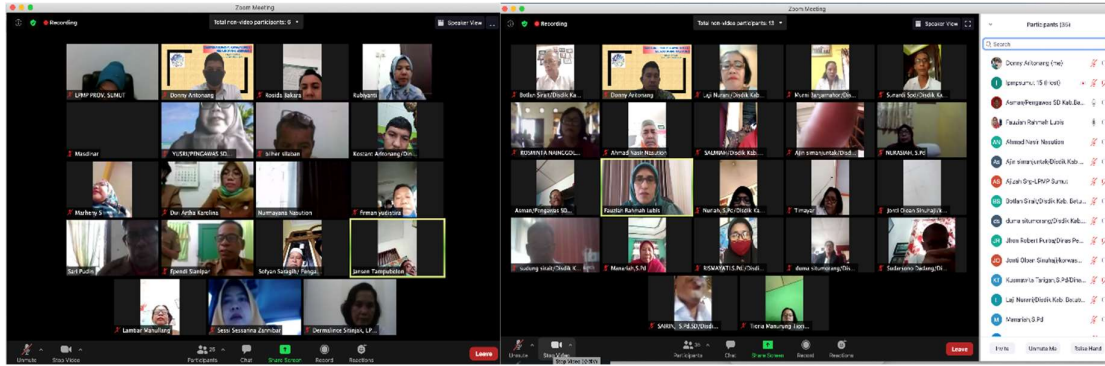


Gambar 1.2 Pelaksanaan *Rapid Test* di LPMP Provinsi Sumatera Utara

### 3) Kebijakan Belajar Dari Rumah Pada Satuan Pendidikan.

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam masa Darurat Penyebaran Covid-19 untuk melaksanakan Program BDR. Terkait dengan hal tersebut LPMP Provinsi Sumatera Utara telah memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan di 33 kabupaten/kota dalam mendukung pembelajaran jarak jauh dengan kegiatan Bimbingan Teknis antara lain :

- Bimbingan Teknis Pengenalan dan Pemanfaatan Aplikasi *Cisco Webex*, *Zoom* dan *MS Team* Dalam Pembelajaran.
- Bimbingan Teknis Monitoring Dan Evaluasi Pembelajaran Saat Belajar Dari Rumah.
- Bimbingan Teknis *E-Learning Open Source* Dengan Menggunakan *Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning)*.
- Bimbingan Teknis *Microsoft Form* untuk pembelajaran (membuat soal, membuat *link* dan *share shortener*, membuat soal dan *barcode MS Form*).



Gambar 1.3. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Daring

#### 4) LPMP Provinsi Sumatera Utara Belum Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).

Untuk mewujudkan unit pelayanan yang berkinerja tinggi dan berintegritas, LPMP Provinsi Sumatera Utara sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbud telah melaksanakan kegiatan pencanangan dan penandatanganan komitmen pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). LPMP Provinsi Sumatera Utara membuat target untuk memperoleh predikat ZI-WBK pada tahun 2021 sebagai upaya mendukung Reformasi Birokrasi yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagai berikut.

- a. Pembangunan reformasi birokrasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sesuai tujuan pembangunan nasional;
- b. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi;
- c. Pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai komponen hasil pembangunan ZI-WBK.



Gambar 1.4 Penandatanganan Komitmen Bersama Mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP Provinsi Sumatera Utara



Gambar 1.5. Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara Bersama Agen Perubahan



Gambar 1.6. Pembacaan Ikrar Agen Perubahan LPMP Provinsi Sumatera Utara

#### **5) Fitur Laman LPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 belum optimal**

Bagi suatu lembaga atau perusahaan, laman memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membangun citra diri mereka terhadap para pengunjung. Melalui berbagai informasi yang terdapat di laman, pengunjung dapat menilai apakah lembaga atau perusahaan tersebut sudah baik atau belum.

Tampilan laman LPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dinilai kurang menarik disebabkan kurang lengkapnya fitur yang tersedia seperti video dan survei. Selain itu cukup sulit dalam penggunaan dan perawatan oleh pengelola laman.

Dalam rangka melaksanakan strategi pengembangan *e-government* dan meningkatkan pelayanan prima lembaga kepada para pemangku kepentingan pendidikan maka LPMP Provinsi Sumatera Utara terus berbenah menjadi lebih baik dalam membuat serta mengembangkan laman. Dalam era informasi elektronik saat ini, keberadaan laman lembaga diyakini dapat memberikan banyak manfaat kepada para pemangku kepentingan dalam memperoleh ataupun mengakses informasi seputar dunia pendidikan secara cepat dan mudah. Laman LPMP Provinsi Sumatera Utara memberikan informasi seputar dunia pendidikan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh LPMP Provinsi Sumatera Utara.

Saat ini telah dilakukan pengembangan laman lembaga dengan tampilan lebih menarik dan fitur yang terbaru. Saat ini sedang dilakukan proses migrasi dari alamat <http://118.98.229.127/> menuju <http://lpmp-sumut.kemdikbud.go.id/>.





Gambar 1.7. Tampilan Laman LPMP Provinsi Sumatera Utara Lama.



Gambar 1.8. Tampilan Laman LPMP Provinsi Sumatera Utara Baru.

Tabel 1.1 Keunggulan laman baru LPMP Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Aspek Tampilan, Keamanan dan Penggunaan

No.	Aspek Tampilan	Aspek Keamanan	Aspek Penggunaan
1	Tampilan laman dengan gaya minimalis fokus;	Fitur <i>url</i> login khusus;	Bahasa antar muka menggunakan Bahasa Indonesia;
2	Fitur elemen <i>new flash</i> berupa teks bergerak;	Fasilitas <i>backup</i> dan <i>restore web</i> ;	Fitur menyerupai MS Word pada <i>editor web</i> ;
3	Fitur pemutar video;	Aplikasi dua tahap <i>staging</i> di <i>development server</i> LPMP Provinsi Sumatera Utara dan <i>production server</i> ;	Modul manajemen video;
4	Fitur galeri foto yang modern;	<i>Production server</i> hanya bisa diakses melalui alamat mesin tertentu;	<i>Banner</i> beranda berupa gambar yang dapat disesuaikan ukurannya secara mandiri;
5	Fitur galeri video yang modern;	Fasilitas <i>logging history</i> .	Penggunaan dan perawatan yang lebih mudah;
6	Fitur tema khusus Hari Kemerdekaan RI dan Hari Pendidikan Nasional;		Terdapat panduan penggunaan.
7	Kode warna sesuai dengan warna lembaga		

Dengan keunggulan di atas, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Utara menyakini laman lembaga tersebut dapat meningkatkan citra positif lembaga dan memberikan kemudahan bagi pengelola laman dalam menyampaikan informasi yang terbaru, kreatif dan inovatif kepada para pemangku kepentingan.

# **BAB - II**

# **PERENCANAAN**

# **KINERJA**

**LPMP PROVINSI**  
**SUMATERA UTARA**

**SIAP BERSIH MELAYANI MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### VISI

**Mewujudkan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Utara yang mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, berakhlak mulia, gotong royong dan berkebinekaan global.**

### MISI :

Upaya LPMP Provinsi Sumatera Utara untuk mencapai visi yang telah ditetapkan dilakukan dengan melaksanakan misi yang juga merupakan penyelenggaraan fungsi lembaga sesuai Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 44 sebagai berikut :

- (M1) Melaksanakan pemetaan mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- (M2) Melaksanakan supervisi satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- (M3) Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional;
- (M4) Melaksanakan pengembangan model penjaminan mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah secara nasional;
- (M5) Melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
- (M6) Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- (M7) Melaksanakan urusan administrasi dan tata kelola kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

## Tujuan Strategis :

1. Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
2. Perwujudan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan LPMP Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.1. Tahapan Renstra LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1.1. Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75	26,50%	27,4%	28,3%	29,2%	30,1%
		1.2. Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5%	5%	5%	5%	5%
		1.3. Persentase Kab/Kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95%	95,2%	95,4%	95,6%	95,8%
2	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi Sumatera Utara	2.1. Predikat SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara	BB	BB	A	A	A
		2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	81	82	83	84	85

## **Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara :**

Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 ditandatangani pada awal bulan Juni tahun 2020 antara Afrizal Sihotang, S.T., M.Si., selaku Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Utara dengan Hamid Muhammad, Ph.D selaku Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pada tanggal 26 Juni 2020 ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada pasal 42 ayat 2 dinyatakan terdapat perubahan nomenklatur dari LPMP Sumatera Utara menjadi LPMP Provinsi Sumatera Utara.

Pada bulan Agustus tahun 2020 Perjanjian Kinerja direvisi sehubungan dengan telah dilantiknya Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen yang baru. Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Afrizal Sihotang, S.T., M.Si., selaku Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Utara dengan Jumeri, S.TP, M.Si., selaku Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pada bulan November tahun 2020 Perjanjian Kinerja direvisi kembali sehubungan dengan adanya perubahan alokasi anggaran LPMP Provinsi Sumatera Utara yang semula Rp. 45.787.374.000,- menjadi Rp. 42.654.126.000,-.

Di dalam perjanjian Kinerja antara LPMP Provinsi Sumatera Utara dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah terdapat target capaian kinerja pada tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Target Kinerja Yang Terdapat Pada Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1.1. Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75	26,5 %
		1.2. Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5,0%
		1.3. Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95,0%
2.	Terwujudnya tata kelola LPMP yang baik	2.1. Predikat SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara	BB
		2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAKL	81

Agar tercapainya sasaran kinerja, maka dipetakan keterkaitan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan *output* kegiatan LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Peta Keterkaitan IKK Dengan *Output* Kegiatan LPMP Provinsi Sumatera Utara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75
5630.001	Satuan Pendidikan yang Telah Dipetakan Mutu Pendidikannya
5630.003	Satuan Pendidikan yang Telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP.

5630.004	Satuan Pendidikan yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya.
<b>IKK 1.2</b>	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk
5630.002	Satuan Pendidikan yang Telah Disupervisi Dalam Pencapaian SNP.
<b>IKK 1.3</b>	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan
5630.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal.
5630.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker
5630.994	Layanan Perkantoran



# **BAB - III**

# **AKUNTABILITAS**

# **KINERJA**

**LPMP PROVINSI**  
**SUMATERA UTARA**

**SIAP BERSIH MELAYANI MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI**

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2020, LPMP Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian dari setiap target kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari sasaran kegiatan beserta indikator kinerja serta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

#### A. Capaian Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara.

**Sasaran  
Kegiatan**

***“ Meningkatkan Penjaminan Mutu  
Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan “***

#### I. IKK 1.1 Persentase Satuan Pendidikan (Jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (*scorecard*) minimal 75

##### Definisi Operasional:

1. Pada tahun 2020 penghitungan masih menggunakan indeks mutu.
2. Indeks mutu satuan pendidikan merupakan sistem perencanaan manajemen dan penilaian kinerja sekolah yang tersusun dalam empat perspektif (komponen), yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.
3. *Baseline* data berasal dari nilai kinerja sekolah laman penjaminan mutu pendidikan tahun sebelumnya.

**Metode:**

1. Menggunakan pendekatan nilai rapor mutu sekolah dari aplikasi PMP tahun 2019.
2. Ditetapkan ambang batas nilai rata-rata SD, SMP, SMA dan SLB sebesar 6,59.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 1.1

Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
IKK 1.1	Persentase Satuan Pendidikan (Jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah ( <i>scorecard</i> ) minimal 75	%	26,5	24,3	91,7%

**II. IKK 1.2. Persentase Kesenjangan Hasil AKM dan Survei Karakter Antara Sekolah Dengan Kinerja Terbaik Dan Kinerja Terburuk****Definisi Operasional :**

1. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) adalah jenis asesmen yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui Kompetensi minimal siswa dalam bidang literasi, numerasi, dan sains;
2. Kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan dalam rangka memberikan masukan kepada pihak yang terkait untuk melakukan intervensi pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolah;
3. Peserta AKM yaitu siswa kelas 5, 8, dan 11 meliputi sampel siswa di seluruh satuan pendidikan formal;
4. Jumlah siswa yang nilainya mencapai standar minimal untuk survei karakter;
5. Survei dilakukan pada semua jenjang Pendidikan;
6. Survei Karakter mengukur :
  - a) keterampilan sosial-emosional-etis-spiritual;

- b) kesejahteraan psikologis siswa dan guru;
  - c) praktik pengajaran/iklim belajar dan iklim sekolah.
7. Standar minimum yang bisa ditetapkan berdasarkan pertimbangan normatif dan praktis sesuai kondisi setiap sekolah atau daerah;
  8. AKM baru akan dilaksanakan pada 2021, untuk target 2020 menggunakan Survei Karakter.

### Metode :

1. Menggunakan pendekatan nilai rapor mutu sekolah dari aplikasi PMP tahun 2019;
2. Populasi 11.492 sekolah;
3. Ambang batas kinerja terburuk 6,13 (p-0,02);
4. Ambang batas kinerja terbaik 6,75 (p-0,98) ;
5. Sekolah yang memiliki nilai <6,13 dan >6,75 adalah 387 sekolah.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 1.2

Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
IKK 1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5	3,4	147%

### III. IKK 1.3. Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk

#### Definisi Operasional :

1. Data Pokok Pendidikan adalah sistem pendataan yang dikelola Kemendikbud yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan,

- dan substansi pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring melalui laman Dapodik;
2. Akurat bila data telah melalui tahap *Cleansing* data (ganda, salah satuan, dsb), persentase diatas rata-rata 95%;
  3. Berkelanjutan bila pendataan dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus-menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%;
  4. Terbaru bila pemutakhiran data dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus-menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%.

### Metode :

1. Menggunakan data rapor Dapodik *online*

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 1.3

Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
IKK 1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95	97,49	102,62%

Tingkat ketercapaian sasaran kegiatan LPMP Provinsi Sumatera Utara dapat dijabarkan melalui capaian 3 Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

IKK1.1. Persentase Satuan Pendidikan (Jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (*scorecard*) minimal 75

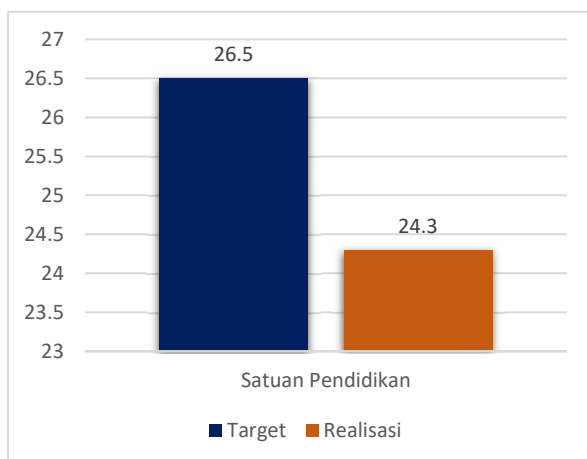
Untuk tahun 2020 belum tersedia data *scorecard* satuan pendidikan, sehingga pengukuran capaian kinerja IKK 1.1 menggunakan pendekatan nilai rapor mutu sekolah tahun 2019. *Scorecard* 75 dikonversikan menjadi nilai 6,59 pada rapor mutu.

Tabel 3.4. Jumlah Sekolah Berdasarkan Nilai Rapor Mutu

Jenjang	Diatas 6,59		Dibawah 6,59		Total Jumlah Sekolah
	Jumlah Sekolah	Persen	Jumlah Sekolah	Persen	
SD	1,675	19.7%	6,847	80.3%	8,522
SMP	731	33.0%	1,483	67.0%	2,214
SMA	418	46.2%	486	53.8%	904
Grand Total	2,824	24.3%	8,816	75.7%	11,640

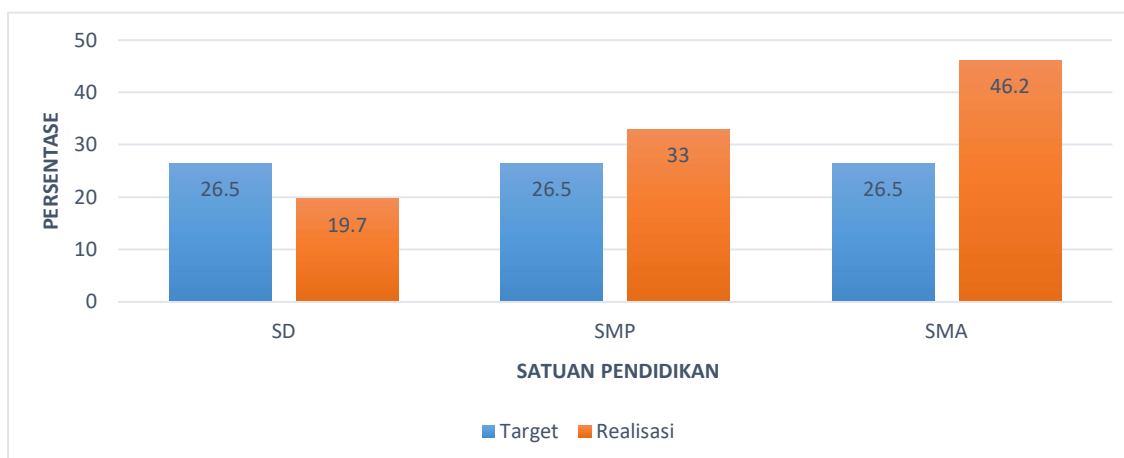
\*nilai rapor mutu SLB belum ada

#### Analisis Ketercapaian/ketidaktercapaian :



Dari 13.496 satuan pendidikan jenjang SD, SMP dan SMA yang ada di Provinsi Sumatera Utara, terdapat 11.640 satuan pendidikan yang mengirim data mutu dan dapat diolah. Terdapat 2.824 satuan pendidikan dengan nilai rapor mutu di atas 6,59. Dengan demikian persentase jumlah sekolah yang nilai rapor mutu diatas 6,59 adalah sebesar 24,3 %. Jika dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja yaitu 26,5 %, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk IKK 1.1 Persentase Satuan Pendidikan (Jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (*scorecard*) minimal 75 **belum tercapai**.

Grafik 3.1. Persentase Satuan Pendidikan Dengan Nilai Rapor Mutu Diatas 6,59



Grafik 3.2. Persentase Satuan Pendidikan Dengan Nilai Rapor Mutu Diatas 6,59

Untuk jenjang SD, dari 8.522 sekolah yang mengirim data mutu dan dapat diolah, terdapat 1.675 sekolah yang nilai rapor mutunya di atas 6,59. Dengan demikian persentase jumlah sekolah yang nilai rapor mutunya di atas 6,59 adalah sebesar 19,7 %. Jika dibandingkan dengan target yang ada di perjanjian kinerja yaitu 26,5 % maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk Persentase Satuan Pendidikan jenjang SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (*scorecard*) minimal 75 **belum tercapai**.

Untuk jenjang SMP, dari 2.214 sekolah yang mengirim data mutu dan dapat diolah, terdapat 731 sekolah yang nilai rapor mutunya di atas 6,59. Dengan demikian persentase jumlah sekolah yang nilai rapor mutunya di atas 6,59 adalah sebesar 33 %. Jika dibandingkan dengan target yang ada di perjanjian kinerja yaitu 26,5 % maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk Persentase Satuan Pendidikan jenjang SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (*scorecard*) minimal 75 **telah tercapai**.

Untuk jenjang SMA, dari 904 sekolah yang mengirim data mutu dan dapat diolah, terdapat 418 sekolah yang nilai rapor mutunya di atas 6,59. Dengan demikian persentase jumlah sekolah yang nilai rapor mutunya di atas 6,59 adalah sebesar 46,2 %. Jika dibandingkan dengan target yang ada di perjanjian kinerja yaitu 26,5 % maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk Persentase Satuan Pendidikan jenjang SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (*scorecard*) minimal 75 **telah tercapai**.

Tabel 3.5. Hambatan Dan Solusi Dalam Merealisasikan Target Pada IKK 1.1.

Hambatan Dalam Merealisasikan Target pada IKK 1.1	Solusi Yang Dilakukan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak tercapainya nilai rapor mutu sekolah dengan nilai diatas 6,59 disebabkan rendahnya pencapaian nilai pada standar pendidik dan tenaga kependidikan serta standar sarana prasarana.</li> <li>- Terbatasnya kewenangan LPMP terhadap satuan pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP).</li> <li>- Belum sepenuhnya terbangun budaya mutu pada satuan pendidikan.</li> <li>- Rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LPMP Provinsi Sumatera Utara menyusun profil mutu pendidikan jenjang SD, SMP dan SMA dan memberikan rekomendasi peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara serta berdasarkan indikator rapor mutu pada masing-masing Standar Nasional Pendidikan (SNP).</li> <li>- LPMP Provinsi Sumatera Utara menjalin kemitraan dengan setiap pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dalam memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan.</li> </ul>

Tabel 3.6. Rekapitulasi Jumlah Sekolah Berdasarkan Nilai Rapor Mutu Kabupaten/Kota

No	Jenjang	Diatas 6,59		Dibawah 6,59		Total Jumlah Sekolah
		Jumlah Sekolah	Persen	Jumlah Sekolah	Persen	
1	Kab. Asahan	96	19.7%	391	80.3%	487
2	Kab. Batubara	112	35.8%	201	64.2%	313
3	Kab. Dairi	35	11.3%	276	88.7%	311
4	Kab. Deli Serdang	271	22.6%	929	77.4%	1,200
5	Kab. Humbang Hasudutan	98	37.3%	165	62.7%	263
6	Kab. Karo	64	20.3%	252	79.7%	316
7	Kab. Labuhan Batu	80	23.9%	255	76.1%	335
8	Kab. Labuhan Batu Selatan	121	46.5%	139	53.5%	260
9	Kab. Labuhan Batu Utara	69	20.7%	265	79.3%	334
10	Kab. Langkat	200	24.2%	626	75.8%	826
11	Kab. Mandailing Natal	119	25.9%	341	74.1%	460
12	Kab. Nias	13	7.8%	153	92.2%	166
13	Kab. Nias Barat	33	28.7%	82	71.3%	115
14	Kab. Nias Selatan	48	10.6%	403	89.4%	451
15	Kab. Nias Utara	34	19.0%	145	81.0%	179
16	Kab. Padang Lawas	29	13.9%	179	86.1%	208
17	Kab. Padang Lawas utara	61	23.6%	197	76.4%	258



18	Kab. Pakpak Bharat	39	45.3%	47	54.7%	86
19	Kab. Samosir	67	33.8%	131	66.2%	198
20	Kab. Serdang Bedagai	117	21.3%	432	78.7%	549
21	Kab. Simalungun	173	17.7%	807	82.3%	980
22	Kab. Tapanuli Selatan	61	23.0%	204	77.0%	265
23	Kab. Tapanuli Tengah	50	18.5%	221	81.5%	271
24	Kab. Tapanuli Utara	79	18.0%	361	82.0%	440
25	Kab. Toba Samosir	46	21.7%	166	78.3%	212
26	Kota Binjai	92	39.0%	144	61.0%	236
27	Kota Gunungsitoli	28	21.9%	100	78.1%	128
28	Kota Medan	362	31.6%	782	68.4%	1,144
29	Kota Padang Sidempuan	30	21.9%	107	78.1%	137
30	Kota Pematangsiantar	94	41.2%	134	58.8%	228
31	Kota Sibolga	18	40.9%	26	59.1%	44
32	Kota Tanjung Balai	34	31.5%	74	68.5%	108
33	Kota Tebing Tinggi	51	38.6%	81	61.4%	132
Grand Total		2,824	24.3%	8,816	75.7%	11,640

Tabel 3.7. Rekapitulasi Jumlah Sekolah Dengan Nilai Rapor Mutu Diatas 6,59 Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten/Kota

No	Jenjang	SD		SMP		SMA		Jumlah Sekolah	Persen
		Jumlah Sekolah	Persen	Jumlah Sekolah	Persen	Jumlah Sekolah	Persen		
1	Kab. Asahan	48	9.9%	38	7.8%	10	2.1%	96	19.7%
2	Kab. Batubara	74	23.6%	27	8.6%	11	3.5%	112	35.8%
3	Kab. Dairi	16	5.1%	11	3.5%	8	2.6%	35	11.3%
4	Kab. Deli Serdang	147	12.3%	77	6.4%	47	3.9%	271	22.6%
5	Kab. Humbang Hasudutan	68	25.9%	23	8.7%	7	2.7%	98	37.3%
6	Kab. Karo	30	9.5%	18	5.7%	16	5.1%	64	20.3%
7	Kab. Labuhan Batu	49	14.6%	18	5.4%	13	3.9%	80	23.9%
8	Kab. Labuhan Batu Selatan	97	37.3%	15	5.8%	9	3.5%	121	46.5%
9	Kab. Labuhan Batu Utara	50	15.0%	12	3.6%	7	2.1%	69	20.7%
10	Kab. Langkat	121	14.6%	56	6.8%	23	2.8%	200	24.2%
11	Kab. Mandailing Natal	84	18.3%	27	5.9%	8	1.7%	119	25.9%
12	Kab. Nias	7	4.2%	3	1.8%	3	1.8%	13	7.8%
13	Kab. Nias Barat	22	19.1%	8	7.0%	3	2.6%	33	28.7%
14	Kab. Nias Selatan	36	8.0%	7	1.6%	5	1.1%	48	10.6%
15	Kab. Nias Utara	21	11.7%	11	6.1%	2	1.1%	34	19.0%
16	Kab. Padang Lawas	12	5.8%	10	4.8%	7	3.4%	29	13.9%
17	Kab. Padang Lawas utara	38	14.7%	17	6.6%	6	2.3%	61	23.6%
18	Kab. Pakpak Bharat	23	26.7%	14	16.3%	2	2.3%	39	45.3%
19	Kab. Samosir	44	22.2%	16	8.1%	7	3.5%	67	33.8%
20	Kab. Serdang Bedagai	79	14.4%	23	4.2%	15	2.7%	117	21.3%
21	Kab. Simalungun	107	10.9%	44	4.5%	22	2.2%	173	17.7%
22	Kab. Tapanuli Selatan	35	13.2%	17	6.4%	9	3.4%	61	23.0%

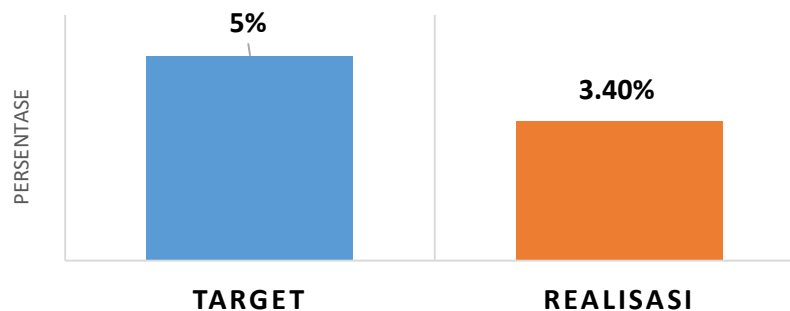
23	Kab. Tapanuli Tengah	24	8.9%	17	6.3%	9	3.3%	50	18.5%
24	Kab. Tapanuli Utara	34	7.7%	27	6.1%	18	4.1%	79	18.0%
25	Kab. Toba Samosir	26	12.3%	11	5.2%	9	4.2%	46	21.7%
26	Kota Binjai	57	24.2%	23	9.7%	12	5.1%	92	39.0%
27	Kota Gunungsitoli	22	17.2%	3	2.3%	3	2.3%	28	21.9%
28	Kota Medan	164	14.3%	105	9.2%	93	8.1%	362	31.6%
29	Kota Padang Sidempuan	15	10.9%	8	5.8%	7	5.1%	30	21.9%
30	Kota Pematangsiantar	58	25.4%	25	11.0%	11	4.8%	94	41.2%
31	Kota Sibolga	12	27.3%	3	6.8%	3	6.8%	18	40.9%
32	Kota Tanjung Balai	19	17.6%	9	8.3%	6	5.6%	34	31.5%
33	Kota Tebing Tinggi	36	27.3%	8	6.1%	7	5.3%	51	38.6%
Grand Total		1,675	14.4%	731	6.3%	418	3.6%	2,824	24.3%

IKK 1.2. : Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter Antara Sekolah dengan Kinerja terbaik dan Kinerja Terburuk.

Tahun 2020 belum tersedia data AKM dan Survei Karakter, sehingga pengukuran capaian kinerja IKK 1.2 menggunakan pendekatan nilai rapor mutu sekolah tahun 2019 dengan menggunakan angka kesenjangan sekolah dengan nilai di bawah 6,13 dan sekolah dengan nilai di atas 6,75.

Tabel 3.8. Jumlah Sekolah Berdasarkan Interval Nilai Rapor Mutu

	6,133<X<6,756	X<6,133 atau X>6,75	Total	Persentase
Jumlah sekolah	11.105	387	11.492	3.4%



Grafik 3.3. Persentase Capaian IKK 1.2

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk adalah sebesar 3,4 %. Jika dibandingkan dengan target yang ada pada perjanjian kinerja yaitu maksimal 5% maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk IKK 1.2 persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk, **sudah tercapai**.

Tabel 3.9. Hambatan Dan Solusi Dalam Merealisasikan Target Pada IKK 1.2.

Hambatan Dalam Pada IKK 1.2	Solusi Yang Dilakukan
Masih terdapat sekolah dengan nilai rapor mutu di bawah 6,13. Hal ini disebabkan rendahnya pencapaian pada standar sarana prasarana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan pendampingan sekolah untuk meningkatkan 8 SNP</li> <li>- Melakukan pengawasan data dapodik sekolah</li> </ul>

Tabel 3.10. Rekapitulasi Jumlah Sekolah Berdasarkan Interval Rapor Mutu Kabupaten/Kota

No	Jenjang	Didalam		Diluar		Total Jumlah Sekolah
		Jumlah Sekolah	Persen	Jumlah Sekolah	Persen	
1	Kab. Asahan	456	93.6%	31	6.4%	487
2	Kab. Batubara	305	97.4%	8	2.6%	313
3	Kab. Dairi	295	94.9%	16	5.1%	311
4	Kab. Deli Serdang	1,137	94.8%	63	5.3%	1,200
5	Kab. Humbang Hasudutan	258	98.1%	5	1.9%	263
6	Kab. Karo	305	96.5%	11	3.5%	316
7	Kab. Labuhan Batu	305	91.0%	30	9.0%	335
8	Kab. Labuhan Batu Selatan	249	95.8%	11	4.2%	260
9	Kab. Labuhan Batu Utara	319	95.5%	15	4.5%	334
10	Kab. Langkat	792	95.9%	34	4.1%	826
11	Kab. Mandailing Natal	447	97.2%	13	2.8%	460
12	Kab. Nias	157	94.6%	9	5.4%	166
13	Kab. Nias Barat	112	97.4%	3	2.6%	115
14	Kab. Nias Selatan	411	91.1%	40	8.9%	451
15	Kab. Nias Utara	176	98.3%	3	1.7%	179
16	Kab. Padang Lawas	197	94.7%	11	5.3%	208
17	Kab. Padang Lawas utara	250	96.9%	8	3.1%	258
18	Kab. Pakpak Bharat	86	100.0%	0	0.0%	86
19	Kab. Samosir	189	95.5%	9	4.5%	198
20	Kab. Serdang Bedagai	527	96.0%	22	4.0%	549
21	Kab. Simalungun	944	96.3%	36	3.7%	980
22	Kab. Tapanuli Selatan	243	91.7%	22	8.3%	265
23	Kab. Tapanuli Tengah	257	94.8%	14	5.2%	271
24	Kab. Tapanuli Utara	420	95.5%	20	4.5%	440

25	Kab. Toba Samosir	207	97.6%	5	2.4%	212
26	Kota Binjai	218	92.4%	18	7.6%	236
27	Kota Gunungsitoli	126	98.4%	2	1.6%	128
28	Kota Medan	1,067	93.3%	77	6.7%	1,144
29	Kota Padang Sidempuan	133	97.1%	4	2.9%	137
30	Kota Pematangsiantar	222	97.4%	6	2.6%	228
31	Kota Sibolga	41	93.2%	3	6.8%	44
32	Kota Tanjung Balai	104	96.3%	4	3.7%	108
33	Kota Tebing Tinggi	127	96.2%	5	3.8%	132
Grand Total		11,082	95.2%	558	4.8%	11,640

Tabel 3.11. Rekapitulasi Sekolah Interval Dalam Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten/Kota

No	Jenjang	SD		SMP		SMA		Total	
		Jumlah Sekolah	Persen	Jumlah Sekolah	Persen	Jumlah Sekolah	Persen	Jumlah Sekolah	Persen
1	Kab. Asahan	354	72.7%	79	16.2%	23	4.7%	456	93.6%
2	Kab. Batubara	238	76.0%	48	15.3%	19	6.1%	305	97.4%
3	Kab. Dairi	218	70.1%	54	17.4%	23	7.4%	295	94.9%
4	Kab. Deli Serdang	797	66.4%	227	18.9%	113	9.4%	1,137	94.8%
5	Kab. Humbang Hasudutan	199	75.7%	44	16.7%	15	5.7%	258	98.1%
6	Kab. Karo	224	70.9%	58	18.4%	23	7.3%	305	96.5%
7	Kab. Labuhan Batu	233	69.6%	52	15.5%	20	6.0%	305	91.0%
8	Kab. Labuhan Batu Selatan	194	74.6%	43	16.5%	12	4.6%	249	95.8%
9	Kab. Labuhan Batu Utara	258	77.2%	45	13.5%	16	4.8%	319	95.5%
10	Kab. Langkat	591	71.5%	139	16.8%	62	7.5%	792	95.9%
11	Kab. Mandailing Natal	358	77.8%	70	15.2%	19	4.1%	447	97.2%
12	Kab. Nias	105	63.3%	44	26.5%	8	4.8%	157	94.6%
13	Kab. Nias Barat	69	60.0%	30	26.1%	13	11.3%	112	97.4%
14	Kab. Nias Selatan	271	60.1%	103	22.8%	37	8.2%	411	91.1%
15	Kab. Nias Utara	118	65.9%	48	26.8%	10	5.6%	176	98.3%
16	Kab. Padang Lawas	156	75.0%	31	14.9%	10	4.8%	197	94.7%
17	Kab. Padang Lawas utara	202	78.3%	37	14.3%	11	4.3%	250	96.9%
18	Kab. Pakpak Bharat	57	66.3%	26	30.2%	3	3.5%	86	100.0%
19	Kab. Samosir	152	76.8%	26	13.1%	11	5.6%	189	95.5%
20	Kab. Serdang Bedagai	428	78.0%	66	12.0%	33	6.0%	527	96.0%
21	Kab. Simalungun	767	78.3%	142	14.5%	35	3.6%	944	96.3%
22	Kab. Tapanuli Selatan	186	70.2%	47	17.7%	10	3.8%	243	91.7%
23	Kab. Tapanuli Tengah	173	63.8%	67	24.7%	17	6.3%	257	94.8%
24	Kab. Tapanuli Utara	323	73.4%	73	16.6%	24	5.5%	420	95.5%
25	Kab. Toba Samosir	163	76.9%	31	14.6%	13	6.1%	207	97.6%
26	Kota Binjai	154	65.3%	42	17.8%	22	9.3%	218	92.4%
27	Kota Gunungsitoli	89	69.5%	27	21.1%	10	7.8%	126	98.4%
28	Kota Medan	662	57.9%	249	21.8%	156	13.6%	1,067	93.3%
29	Kota Padang Sidempuan	93	67.9%	24	17.5%	16	11.7%	133	97.1%
30	Kota Pematangsiantar	158	69.3%	38	16.7%	26	11.4%	222	97.4%
31	Kota Sibolga	26	59.1%	12	27.3%	3	6.8%	41	93.2%
32	Kota Tanjung Balai	76	70.4%	18	16.7%	10	9.3%	104	96.3%
33	Kota Tebing Tinggi	95	72.0%	21	15.9%	11	8.3%	127	96.2%
Grand Total		8,187	70.3%	2,061	17.7%	834	7.2%	11,082	95.2%

**IKK 1.3 : Persentase Kabupaten/Kota Yang Memiliki Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Akurat, Terbaru dan Berkelanjutan**

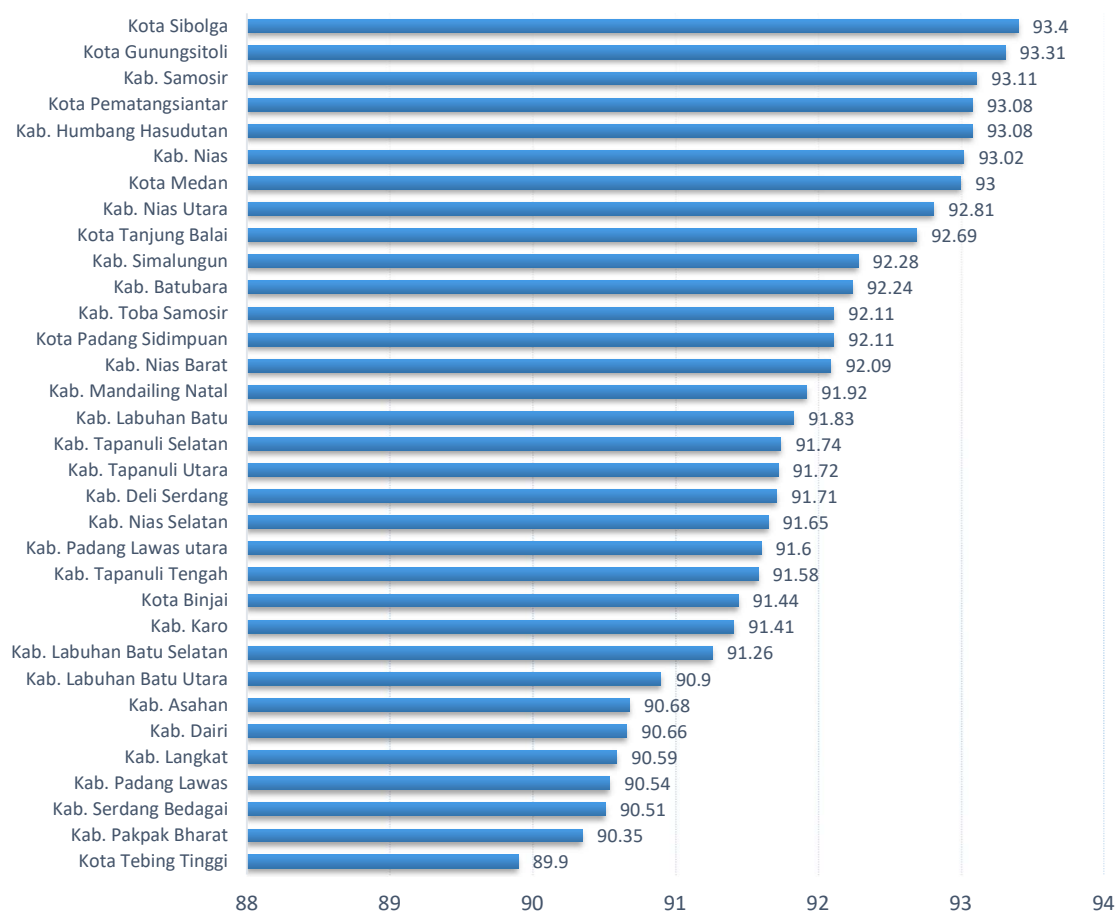
Sesuai dengan Rapor Data Pokok Pendidikan per tanggal 8 Januari 2021, Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai Rapor Dapodik sebesar 97.49 dengan skala poin nilai 1-100.

Sebaran Rapor Akurat, Rapor Berkelanjutan dan Rapor Mutakhir Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12. Sebaran Rapor Data Pokok Pendidikan

Nilai Rapor Nasional	Nilai Rapor Provinsi Sumatera Utara	Rapor Akurat Provinsi Sumatera Utara	Rapor Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara	Rapor Mutakhir Provinsi Sumatera Utara
<b>96.03</b>	<b>96.12</b>	<b>91.83</b>	<b>100</b>	<b>99.66</b>

Nilai sebaran **Rapor Akurat** pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sesuai dengan diagram berikut:



Grafik 3.4. Nilai Sebaran Rapor Akurat di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Grafik 3.4., belum ada Kabupaten/Kota yang memiliki nilai rapor akurat diatas 95, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi indikator dalam penilaian rapor akurat yang belum terpenuhi.

Tingkat keakuratan yang menjadi faktor penilaian adalah sebagai berikut :

1. Sekolah

Sekolah melakukan pengisian seluruh *item* data dapodik: Pengisian Nama Kepala Sekolah, Nomor Telepon Kepala Sekolah, Email Kepala Sekolah, Email Sekolah, Bentuk Pendidikan, Status Sekolah, Nama Sekolah, Isian Kebersediaan Menerima BOS, Isian Akses Internet, Isian Sumber Listrik, Isian Kepemilikan Tanah, Isian Waktu Penyelenggaraan Sekolah, Isian SK Pendirian Sekolah, Isian Tanggal SK Pendirian Sekolah, Isian SK Izin Operasional, Isian Tanggal SK Izin Operasional, Isian Daya Listrik, dan Isian sertifikasi ISO telah terisi dengan benar dan wajar.

2. Pendidik dan Tenaga Pendidik

Sekolah melakukan pengisian seluruh *item* data dapodik: Nama PTK, Tanggal Lahir dan Usia PTK, Nomor telepon PTK, Email PTK, SK CPNS, Tanggal CPNS, TMT PNS, Pangkat Golongan, Nama dan Pekerjaan Suami/Istri, SK Pengangkatan, TMT Pengangkatan, Nama Ibu Kandung, NIK, NUPTK, NIP, Desa/Kelurahan, Nomor HP, Email, NPWP, dan Sekolah Induk PTK telah terisi dengan benar dan wajar.

3. Peserta Didik

Sekolah melakukan pengisian seluruh *item* data dapodik : Nama Peserta Didik, Tanggal lahir dan Usia Peserta Didik, NISN Peserta Didik, Nomor Telepon Peserta Didik, Email Peserta Didik, Nama Ibu Kandung Peserta Didik, Nama Ayah Peserta Didik, Pekerjaan Ibu Peserta Didik, Pekerjaan Ayah Peserta Didik, Penghasilan Ayah Peserta Didik, Nomor KIP Peserta Didik (untuk penerima KIP), Anggota Rombel Peserta Didik, Tinggi Badan Peserta Didik, Berat Badan Peserta Didik, Lintang dan Bujur Alamat Peserta Didik telah terisi dengan benar dan wajar.

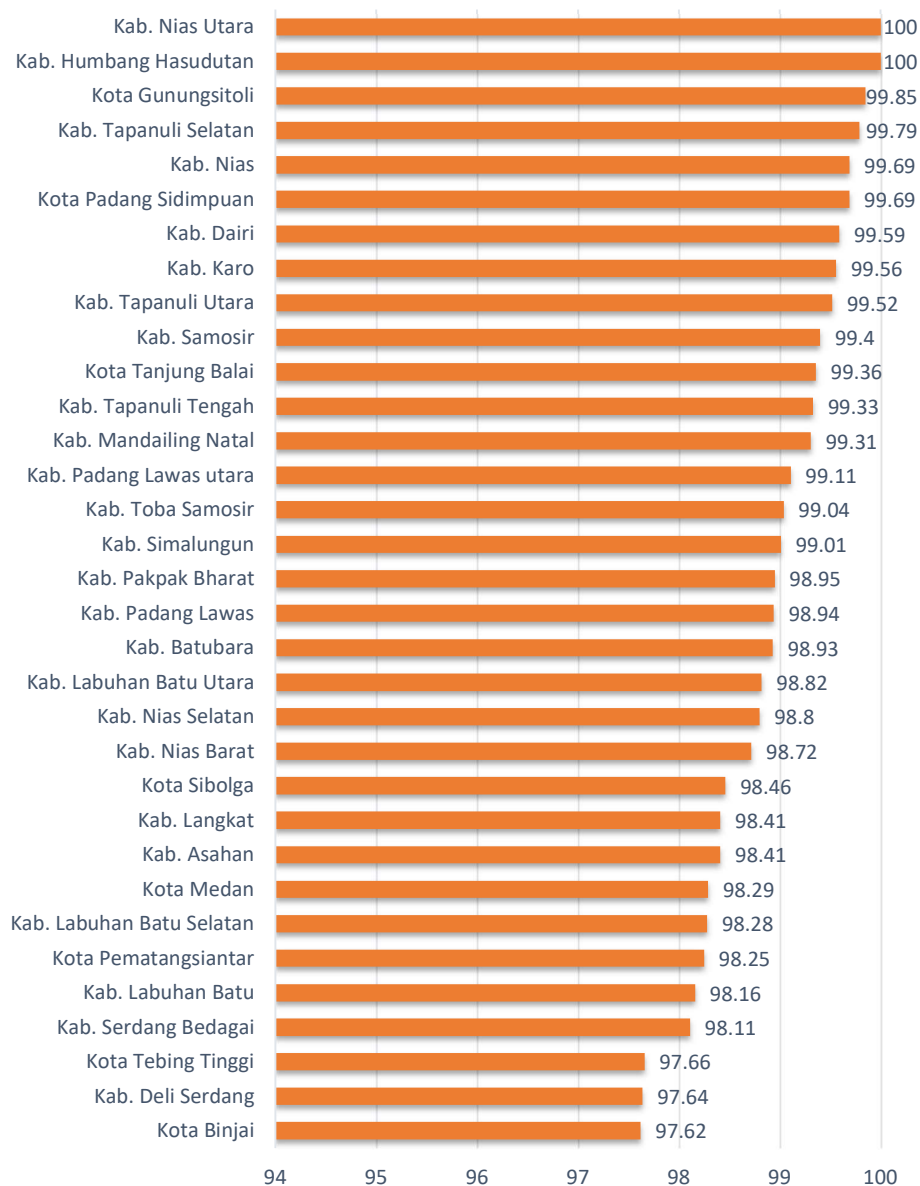
4. Rombongan belajar

Sekolah mengisi data dapodik : Rombongan belajar memiliki wali kelas (jenis rombel reguler), Rombongan belajar menggunakan ruang (jenis rombel reguler), Tingkat rombongan belajar, Anggota rombongan belajar (jenis rombel reguler), Rombongan belajar memiliki Jumlah Jam Mengajar (JJM) telah terisi benar dan wajar.

## 5. Sarana dan prasarana

Sekolah mengisi data dapodik : Rombongan belajar memiliki wali kelas (jenis rombel reguler), Rombongan belajar menggunakan ruang (jenis rombel reguler), Tingkat rombongan belajar, Anggota rombongan belajar (jenis rombel reguler), Rombongan belajar memiliki Jumlah Jam Mengajar (JJM) telah terisi benar dan wajar.

Nilai sebaran **Rapor Berkelanjutan** pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sesuai dengan Grafik 3.5.

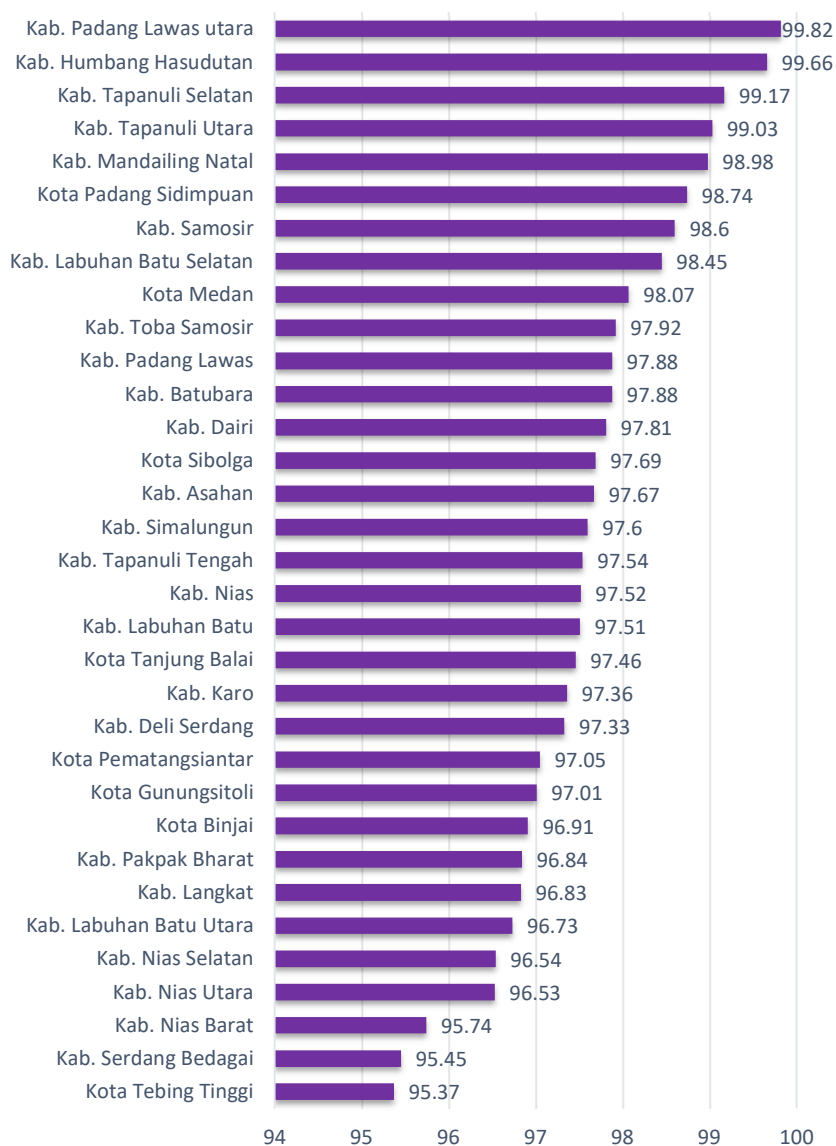


Grafik 3.5. Nilai Sebaran Rapor Berkelanjutan Kabupaten/Kota

Berdasarkan Grafik 3.5., seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (100%) sudah memiliki nilai diatas 95. Sebaran dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebesar 6% (2 Kabupaten) yang memiliki nilai 100, sementara 94% (31 Kabupaten/Kota) memiliki nilai pada rentang: 97.62 - 99.85.

Faktor yang menjadi penilaian Rapor Berkelanjutan adalah Sekolah melakukan sinkronisasi dapodik berturut-turut selama 4 semester terakhir.

Nilai sebaran **Rapor Mutakhir** pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Grafik 3.6.



Grafik 3.6. Nilai Sebaran Rapor Mutakhir Kabupaten/Kota



Berdasarkan Grafik 3.6., terlihat bahwa sebaran dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (100%) sudah memiliki nilai diatas 95.

Faktor yang menjadi penilaian Rapor Mutakhir adalah

1. Indikator Rapor PTK: Sekolah melakukan pembaruan mata pelajaran diampu untuk masing-masing guru pada semester berjalan;
2. Indikator Rapor Peserta Didik: Sekolah melakukan pembaruan data tinggi badan, berat badan, dan lingkaran kepala peserta didik pada semester berjalan;
3. Indikator Rapor Rombongan Belajar: Sekolah melakukan pembaruan pembelajaran pada masing-masing rombel pada semester berjalan;
4. Indikator Rapor Sarpras :Sekolah melakukan pembaruan data periodik kerusakan sarana prasarana pada semester berjalan.

Selain IKK 1.1 , IKK 1.2 dan IKK 1.3 yang telah diuraikan capaian kinerjanya di atas, pada Renstra LPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2024 telah ditetapkan IKK 2.1 untuk pencapaian Predikat SAKIP dan IKK 2.2 untuk pencapaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL.



#### **IKK 2.1 Predikat SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara**

**Definisi Operasional :**

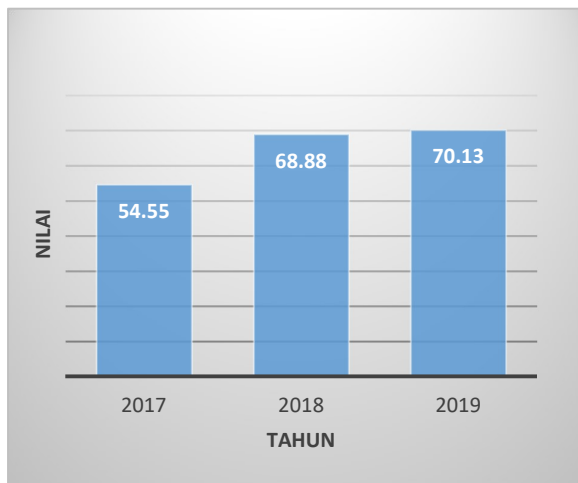
Predikat SAKIP adalah predikat yang diberikan atas pencapaian nilai SAKIP.

**Metode :**

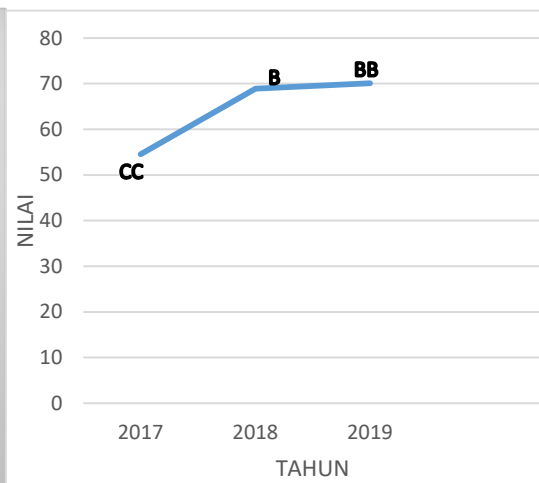
Penilaian dilakukan atas perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi (10%) dan capaian kinerja organisasi (20%).

Tabel 3.13. Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 2.1

Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Capaian 2020	Kesesuaian Target
1	2	3	4	5	6
IKK 2.1	Predikat SAKIP	-	BB	Masih proses penilaian	-



Grafik 3.7. Nilai SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara



Grafik 3.8. Capaian Peringkat SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara

Dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 nilai SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan. Pada Renstra LPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2024 nilai SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2020 ditargetkan mencapai predikat BB.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan Nilai SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara antara lain :

1. Komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai LPMP Provinsi Sumatera Utara ditandai dengan Pencanangan dan Penandatanganan Komitmen Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI-WBK);

2. Rapat rutin yang dipimpin oleh Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara dalam rangka monitoring dan evaluasi 6 area pengungkit dimana salah satu area adalah penguatan akuntabilitas;
3. Pengelolaan akuntabilitas kinerja LPMP yang dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten.



Gambar 3.1. LPMP Provinsi Sumatera Utara Menerima Piagam Penghargaan BMN Untuk Wilayah Kerja KPKNL Medan.

## IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL

### Definisi Operasional :

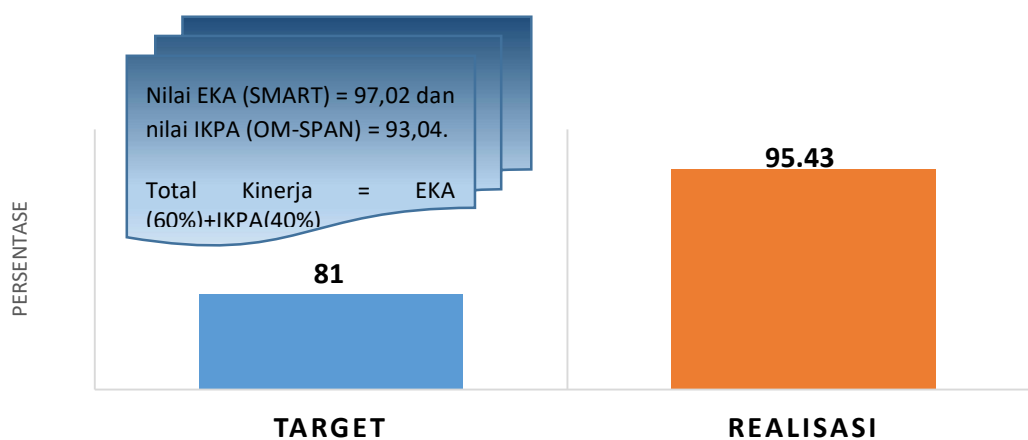
1. Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.
3. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

### Metode :

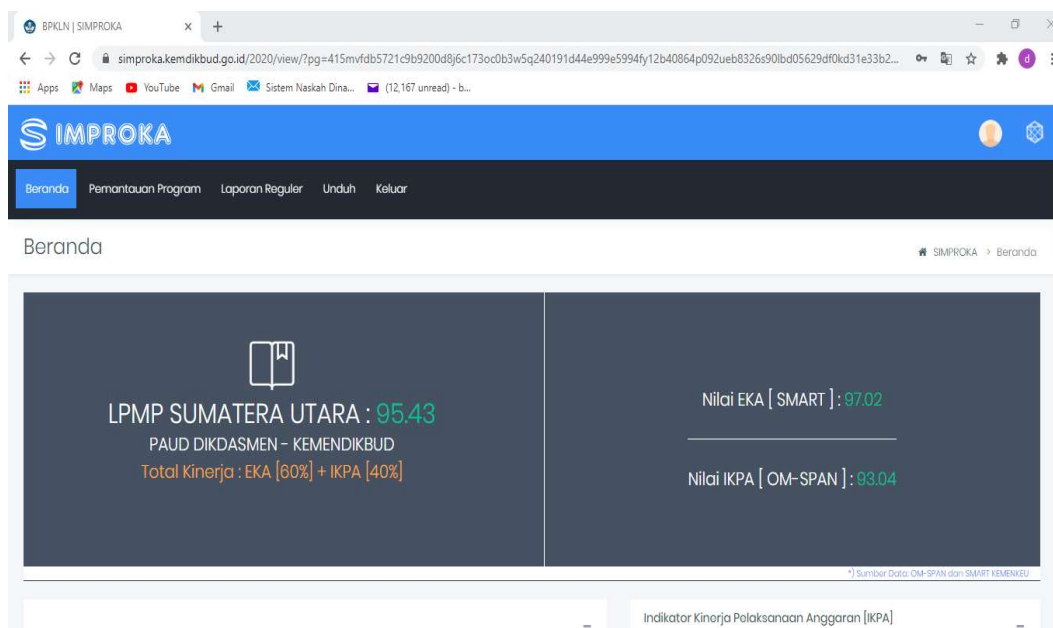
Nilai kinerja Anggaran diperoleh dari penjumlahan antara nilai EKA (60%) dan IKPA (40%).

Tabel 3.14. Capaian Kinerja Anggaran

Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Capaian 2020	Kesesuaian Target
1	2	3	4	5	6
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAKL.	-	81	95,43	117,8 %



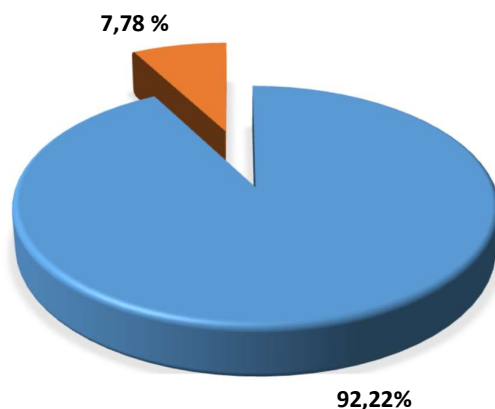
Grafik 3.9. Capaian Kinerja Anggaran LPMP Provinsi Sumatera Utara



Gambar 3.2. Aplikasi SIMPROKA LPMP Provinsi Sumatera Utara

## B. Realisasi Anggaran

### KINERJA ANGGARAN TAHUN 2020



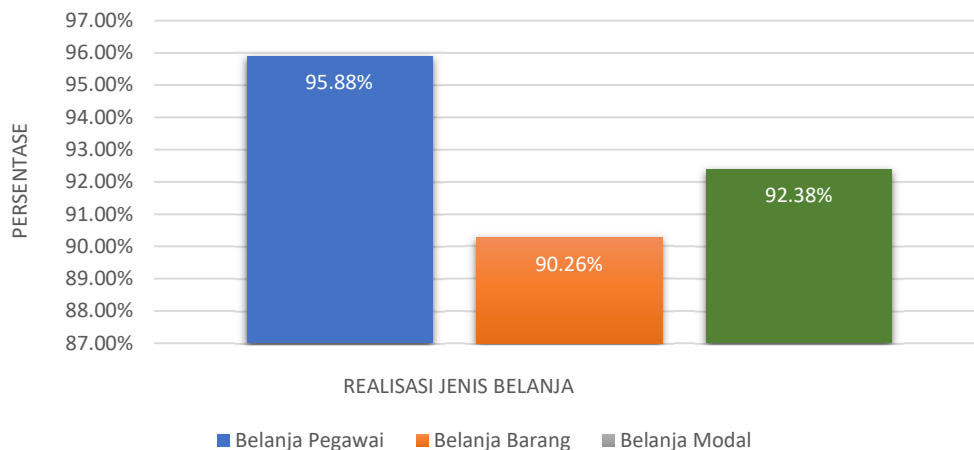
Grafik 3.10. Persentase Kinerja Anggaran Tahun 2020

Tabel 3.15. Alokasi, Realisasi dan Persentase Daya Serap Anggaran

Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Daya Serap
Rp 42.654.126.000	Rp 39.336.468.221	92,22%

Tabel 3.16. Realisasi Anggaran Perjenis Belanja

Kode	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Daya Serap
51	Belanja Pegawai	12.659.108.000,-	12.137.302.951,-	95,88%
52	Belanja Barang	24.011.518.000,-	21.671.813.725,-	90,26%
53	Belanja modal	5.983.500.000,-	5.527.351.545,-	92,38%
57	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0

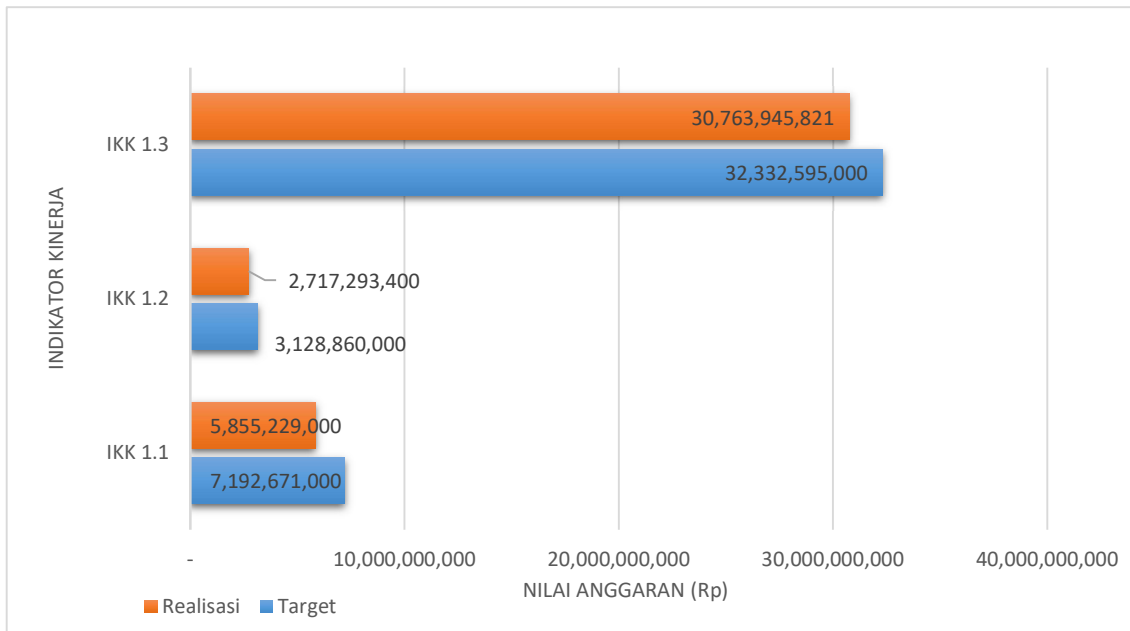


Grafik 3.11. Persentase Kinerja Anggaran Berdasarkan Realisasi Jenis Belanja

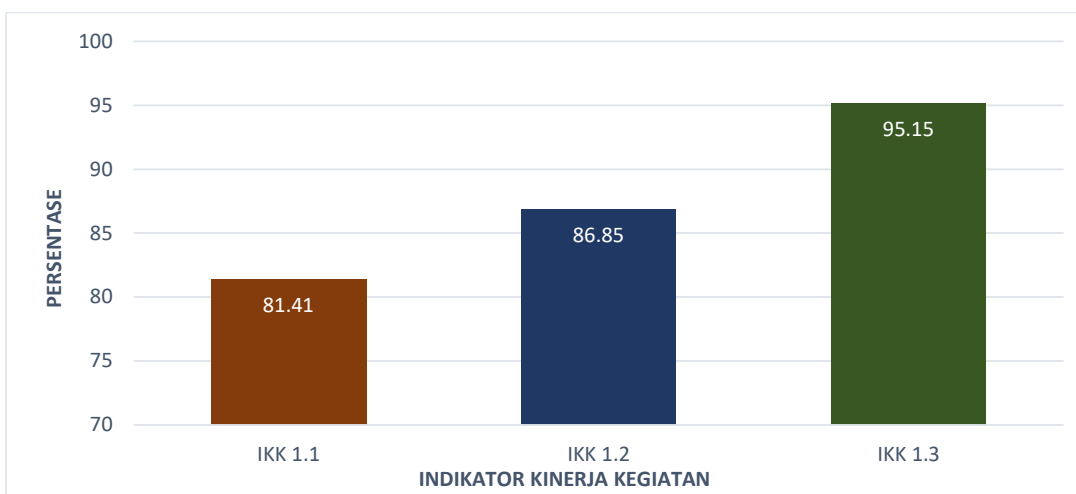
Tabel 3.17. Realisasi Anggaran Berdasarkan *Output*

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan			
	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Daya Serap
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75			
5630.001	Satuan Pendidikan yang Telah Dipetakan Mutu Pendidikannya	513.133.000,-	468.933.000,-	91,39%
5630.003	Satuan Pendidikan yang Telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP.	4.441.684.000,-	3.425.809.000,-	77,13%
5630.004	Satuan Pendidikan yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya.	2.237.854.000,-	1.960.487.000,-	87,61%
	<b>Jumlah</b>	<b>7.192.671.000</b>	<b>5.855.229.000,-</b>	<b>81,41%</b>
IKK 1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk			
5630.002	Satuan Pendidikan yang Telah Disupervisi Dalam Pencapaian SNP.	3.128.860.000,-	2.717.293.400,-	86,85%
IKK 1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan			

5630.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal.	5.983.500.000,-	5.527.351.545,-	92,38%
5630.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	3.962.075.000,-	3.397.531.750,-	85,75%
5630.994	Layanan Perkantoran	22.387.020.000,-	21.839.062.526	97,55%
	<b>Jumlah</b>	<b>32.332.595.000,-</b>	<b>30.763.945.821,-</b>	<b>95,15%</b>



Grafik 3.12. Target dan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan



Grafik 3.13. Persentase Daya Serap Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan



# **BAB - IV**

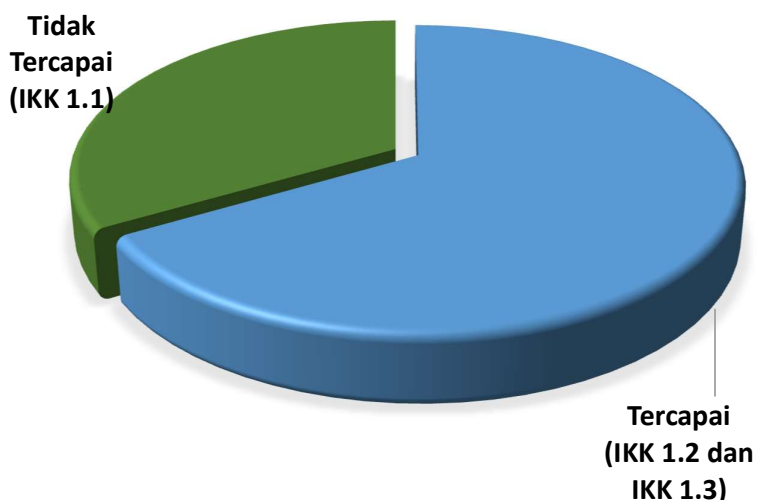
# **PENUTUP**

**LPMP PROVINSI**  
**SUMATERA UTARA**

**SIAP BERSIH MELAYANI MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI**

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2020. Laporan ini menyajikan capaian kinerja atas program yang dilaksanakan yang mencakup tingkat capaian 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2020.



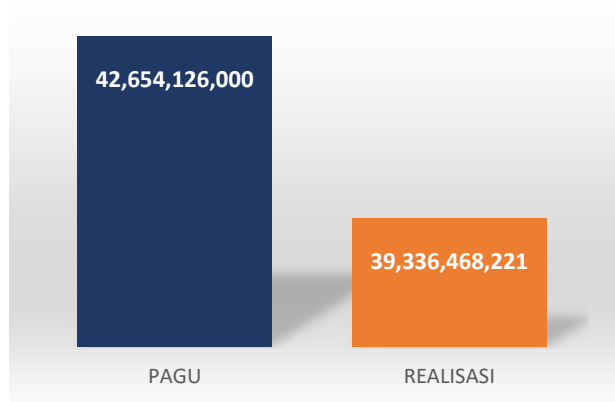
Grafik 4.1. Persentase Daya Serap Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan

Dari total 3 Indikator Kinerja Kegiatan, ada 2 IKK yang capaian kinerjanya lebih besar dari 100% yaitu IKK 1.2 dan IKK 1.3. sementara itu capaian kinerja IKK 1.1 masih di bawah 100%.

- A. IKK 1.1 persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (*scorecard*) minimal 75, dengan realisasi 24,3% dari target sebesar 26,5% sehingga nilai capaian kinerja 91,7%. Untuk meningkatkan capaian IKK 1.1, LPMP Provinsi Sumatera Utara menyusun profil mutu pendidikan jenjang SD, SMP dan SMA dan memberikan rekomendasi peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara serta berdasarkan indikator rapor mutu pada masing-masing Standar

Nasional Pendidikan (SNP). Selain itu, LPMP Provinsi Sumatera Utara menjalin kemitraan dengan setiap pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dalam memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan.

- B. IKK 1.2 persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk, realisasi kesenjangan adalah 3,4 % dari target sebesar 5% sehingga capaian kinerjanya = 147%. Untuk memperkecil kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter, LPMP Provinsi Sumatera Utara telah melakukan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan melalui pendampingan dan pengawasan ke Satuan Pendidikan Kabupaten/Kota.
- C. IKK 1.3 persentase Kabupaten/Kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan, realisasinya 97,49% dari target sebesar 95%, sehingga capaian kinerjanya = 102,62%.



Pagu Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 42.654.126.000,- berhasil direalisasikan sebesar Rp. 39.336.468.221,- sehingga persentase daya serap LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 sebesar 92,22%.

Grafik 4.2. Realisasi Anggaran LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Keberhasilan dan kegagalan yang ada pada tahun pertama pelaksanaan Renstra LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 merupakan dasar bagi LPMP Provinsi Sumatera Utara dalam menyempurnakan program dan kegiatan di tahun mendatang, sehingga target yang telah ditetapkan pada Renstra dapat tercapai.

# **LAMPIRAN**

**LPMP PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

**SIAP BERSIH MELAYANI MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI**



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**  
**Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)**  
**Sumatera Utara**  
**dengan**  
**Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,**  
**Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AFRIZAL SIHOTANG  
Jabatan : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Utara  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMID MUHAMMAD  
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan  
Pendidikan Menengah  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2020

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan  
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah,

HAMID MUHAMMAD

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu  
Pendidikan (LPMP) Sumatera Utara,



AFRIZAL SIHOTANG

## TARGET KINERJA

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1.1. Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 1.2. Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk 1.3. Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	26,5 % 5,0% 95,0%
2.	Terwujudnya Tata Kelola LPMP yang baik	2.1. Predikat SAKIP LPMP Sumatera Utara 2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	BB 81



**KEGIATAN DAN ANGGARAN**

No	Kegiatan/Output	Anggaran
1.	Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya.	472.600.000
2.	Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP.	3.008.450.000
3.	Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP.	5.786.100.000
4.	Satuan Pendidikan yang terverifikasi mutu pendidikannya.	2.513.400.000
5.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5.983.500.000
6.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	4.844.408.000
7.	Layanan Perkantoran	23.178.916.000
	Jumlah	45.787.374.000

Jakarta, Juni 2020

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan  
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah,



HAMID MUHAMMAD

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu  
Pendidikan (LPMP) Sumatera Utara,



AFRIZAL SIHOTANG



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**  
**Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi**  
**Sumatera Utara**  
**dengan**  
**Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Afrizal Sihotang, S.T., M.Si.

Jabatan : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Jumeri, S.TP, M.Si

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

Jumeri, S.TP, M.Si

Jakarta, Agustus 2020  
Kepala Lembaga Penjaminan  
Mutu Pendidikan Provinsi  
Sumatera Utara

Afrizal Sihotang, S.T., M.Si.



2009211553020



**TARGET KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1.1 Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) minimal 75	%	26,50
		1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5,00
		1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,00

**KEGIATAN DAN ANGGARAN**

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5630	Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	45.787.374.000
TOTAL			45.787.374.000

Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

  
(Jumeri, S.TP, M.Si)Jakarta, Agustus 2020  
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu  
Pendidikan Provinsi Sumatera  
Utara  
(Afrizal Sihotang, S.T., M.Si.)

2009211553020



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**  
**Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi**  
**Sumatera Utara**  
**dengan**  
**Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Afrizal Sihotang, S.T., M.Si.

Jabatan : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Jumeri, S.TP, M.Si

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

Jumeri, S.TP, M.Si

Jakarta, November 2020  
Kepala Lembaga Penjaminan  
Mutu Pendidikan Provinsi  
Sumatera Utara

Afrizal Sihotang, S.T., M.Si.



2012121011504

**TARGET KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1.1 Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) minimal 75	%	26,50
		1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5,00
		1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,00

**KEGIATAN DAN ANGGARAN**

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5630	Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	42.654.126.000
<b>TOTAL</b>			<b>42.654.126.000</b>

Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

(Jumen, S.TP, M.Si)

Jakarta, November 2020  
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu  
Pendidikan Provinsi Sumatera  
Utara

(Afrizal Sihotang, S.T., M.Si.)



2012121011504



**PENGUKURAN KINERJA**  
**LMPM PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (%)	TAHUN 2020					
			Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Daya Serap (%)
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.	Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75	30.10	26.50	24.30	91.70	7,192,671,000	5,855,229,000	81.41
	Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5.00	5.00	3.40	147.06	3,128,860,000	2,717,293,400	86.85
	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	95.80	95.00	97.49	102.62	32,332,595,000	30,763,945,821	95.15
<b>TOTAL ANGGARAN</b>						<b>42,654,126,000</b>	<b>39,336,468,221</b>	<b>92.22</b>

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LPMP PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2020 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen LPMP Provinsi Sumatera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Medan, 27 Januari 2021  
KETUA TIM PEREVIU,



Ajizah Siregar, M.Pd  
NIP 196910101991032003